

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang masyarakatnya heterogen jika dilihat dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan status sosial. Dengan demikian dilihat dari kondisi ini bagaimana seorang perempuan mampu memasuki anggota legislatif. Keterlibatan wanita dalam bidang politik serta dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik di Indonesia memiliki akar historis yang cukup panjang (Prisna, 1999). Dikatakan demikian karena saat ini masih minimnya anggota legislatif yang anggotanya secara keseluruhan sama rata antara perempuan dan laki-laki. Secara historis, khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan lembaga atau aktivitas kerja diluar rumah seperti berlayar atau bertani, sementara perempuan bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah, misalnya memasak, mengurus rumah dan anak. Hal ini sesuai dengan Cozens and West (2000 : 185) yang menyatakan bahwa :

"Historically the external world has been the business of men, women took care of the internal world. Politics traditionally is external, but not necessarily the business of all men-often only of the few".

Meski demikian pernyataan Conzen and West ini tidak berlaku dengan majunya perempuan dalam lingkungan politik. Pada masa kemerdekaan sudah ada Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke 5 dan satu-satunya presiden perempuan di Indonesia. Serta pejabat menteri di pemerintahan saat ini sudah mulai banyak diduduki oleh perempuan, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno; Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani; Menteri Kesehatan, Nila F Moeleok; Menteri Sosial, Kholidah Indar Parawansa; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise; Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi; dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Kedelapan perempuan ini berada diantara 34 menteri lainnya yang ada dalam pemerintahan saat ini. Dalam dunia politik, peranan perempuan menunjukkan fenomena menarik dikatakan demikian karena perempuan tidak hanya memerankan politik secara tradisional (domestik) sebagai agen sosialisasi politik bagi anak-anaknya, akan tetapi sudah mulai aktif memperjuangkan kepentingan umum melalui lembaga sosial atau lembaga politik.

Untuk era modern ini sudah banyak gerakan global perempuan yang menghendaki perempuan banyak andil dalam pembangunan seperti apa yang dilakukan kaum pria. Keterlibatan perempuan yang semula hanya berkutat pada "somer", "kasor", serta "dheper" (istilah madura), harus mampu memperjuangkan

hak-haknya. Seperti yang biasa kita dengar dari masyarakat terdahulu bahwa seorang perempuan tidak akan lepas dari kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, namun tidak salah jika seorang perempuan memiliki andil dalam dunia politik serta didukung oleh adanya kemampuan dan pengembangan kemampuan di bidang politik. Dengan adanya Undang-Undang Pemilu yang memberikan porsi 30 % keterwakilan perempuan pada bidang legislatif diharapkan akan membawa dampak kearah transisi demokrasi yang dapat menghasilkan suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam proses demokratisasi politik.

Pengakuan terhadap keterlibatan perempuan di sektor publik bukan hanya sebuah jargon, akan tetapi sudah merupakan ideologi yang memberikan ruang gerak yang luas bagi kaum hawa. Fenomena ini telah memberikan kondisi riil bagi perempuan untuk mengimplementasikan potensi diri yang memiliki hak signifikan sekaligus mengaktualisasikan peran gandanya. Salah satu wujud kemampuan perempuan dalam mengaktualisasikan perannya adalah terpilihnya Ummul Hasanah menjadi anggota DPRD kabupaten Sumenep melalui daerah pemilihan Sumenep 2. Persoalan perempuan yang menjabat anggota parlemen menjadi menarik mengingat budaya Madura pada umumnya terkenal sebagai masyarakat yang patriarkis dan religius. Norma-norma agama (Islam) bagi masyarakat madura selalu dijadikan acuan dan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan politik adalah mutlak dari pria.

Apabila dilihat dari sudut pandang demokrasi dan keadilan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dalam kehidupan yang mereka jalani, maka keadaan marginal tampak jelas dalam politik di Madura. Diskriminasi yang dimaksud tampak jelas pada sektor publik sebenarnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan Sumenep sudah cukup memadai. Namun tetap belum memadai jika dibandingkan keterwakilan kaum laki-laki. Pada peringkat birokrasi pemerintahan Sumenep, keterwakilan dan representasi kaum perempuan sudah cukup memadai berdasarkan pemilihan umum 2014. Akan tetapi ironisnya adalah hanya beberapa dari sejumlah keterwakilan kaum perempuan yang terpilih dan duduk menjadi anggota DPRD di Madura. Seperti halnya di kabupaten Sumenep dari 203 calon legislatif yang terpilih menjadi anggota DPRD hanya 3 orang saja. Hal ini tentunya tidak lepas dari masyarakat yang melihat bahwa perempuan hanya berada sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kehidupan internal.

Pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014 (pemilihan anggota DPR) dan 9 Juli 2014 (pemilihan presiden) sistem langsung adalah cara yang dianggap paling tepat untuk mewakili suara rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Sayangnya berdasarkan pengalaman, banyak wakil perempuan yang tidak terpilih dalam proses pemilihan anggota DPR. Dengan demikian tidak ada keseimbangan gender dalam keterwakilan politik dengan komposisi jumlah perempuan di Indonesia.

Dampak yang mencolok dari proses tersebut, kepentingan perempuan tidak teraktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Masyarakat berpikir perempuan yang menggeluti bidang politik dianggap sebagai hal yang tabu berbeda dengan laki-laki yang bisa bergaul di dunia politik tanpa balasan. Kampanye kandidat baik perempuan maupun pria tentunya tidak lepas dari peran komunikasi sebagai faktor penentu keberhasilan kampanye kandidat partai. Untuk melancarkan komunikasinya pemerintah memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar efek yang diharapkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Di era teknologi informasi saat ini, peran media tidak dapat dipisahkan dari segala jenis kegiatan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat membawa pada era masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang menggunakan jasa teknologi sebagai salah satu komoditas utama.

Komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Anwar Arifin, 2011). Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah". Dalam komunikasi politik terdapat unsur yang sama dengan unsur komunikasi itu sendiri yaitu komunikator, pesan, media, komunikan atau khalayak dan efek (*feed back*). Komunikator dalam komunikasi politik diantaranya: politisi atau politikus, profesional, dan aktivis.

Aktifitas dari komunikasi politik juga salah satu faktor pendukung keberhasilan salah satu kandidat anggota DPRD Sumenep ini, seperti halnya kampanye yang menggunakan media massa dalam penyampaian pesan atau informasi. Sehingga terlihat jelas unsur komunikasi politik tersebut tidak bisa terpisahkan untuk menghasilkan suatu kepercayaan dan simpati dari masyarakat yang menerima timbal balik pesan kampanye dengan baik. Kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal bagi seorang kandidat merupakan faktor penunjang untuk mendapatkan simpati lebih dari masyarakat pemilih.

Peneliti memilih Ummul Hasanah sebagai babasan dalam proposal ini karena Ummul Hasanah memiliki suara tertinggi dari kedua anggota perempuan DPRD tetap lainnya serta merupakan politisi perempuan yang baru menggeluti dunia politik sehingga sangat menarik jika dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif ini sangat mendasari aktivitas Ummul Hasanah setelah terpilihnya menjadi anggota DPRD, melihat bahwa penelitian sudah banyak dilakukan maka peneliti ingin mengamati dan mendiskripsikan bagaimana sosok ibu Ummul serta aktivitas politik apa saja yang dilakukannya saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana aktivitas politik Ummul Hasanah setelah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah, Mengetahui aktivitas politik Ummul Hasanah setelah menjadi anggota DPRD Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian yang baik bagi mahasiswa mengenai aktivitas komunikasi politik politisi perempuan di Madura. Selain itu sebagai pembanding bagi penelitian berikutnya yang sejenis.
- b. Serta penelitian ini diharapkan untuk mengetahui teori-teori komunikasi politik dan kampanye yang dikemukakan para ahli dapat diterapkan, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik yang digunakan politisi terutama perempuan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap gender dalam politik lagi, karena dalam Undang-Undang pun telah dijelaskan bahwa warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama.